

Analisis Kerjasama Pemerintahan Regional DIY dan Kyoto: Sekarang dan Masa Mendatang

Habib Alfarisi¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional

² Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan,
Universitas Potensi Utama

Abstrak

Paradiplomasi merupakan hubungan diplomasi yang dilakukan oleh aktor non negara. Paradiplomasi merupakan bagian utama dari hubungan internasional era kontemporer. Tulisan ini dibuat untuk melengkapi kajian paradiplomasi yang masih tergolong baru populer di pertengahan tahun 1980an sehingga belum banyak literatur yang mudah ditemukan dalam bahasa Indonesia. Paradiplomasi menguatkan asumsi bahwa hubungan internasional era sekarang tidak hanya diisi oleh aktor negara, melainkan juga aktor non negara. Bentuk paradiplomasi tertuang dalam kerjasama kota kembar (*Sister City*) antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Prefektur Kyoto. Latar belakang kerjasama sangat erat dengan kedekatan historis dan munisipal antara pemimpin daerah sehingga lahir pertukaran sosial dan budaya yang mendekatkan kesepahaman mutual. Kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto telah menjadi salah satu kerjasama Sister Province yang dikatakan cukup produktif dan menghasilkan banyak hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Tulisan bertujuan untuk mengkaji implementasi kerjasama sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19. Penulis menggunakan metode deskriptif-analitik yang memungkinkan peneliti mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau informasi yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penulis menggunakan data dari tahun 2015-2020. Penulis berasumsi bahwa kerjasama Sister City antara DIY dan Kyoto menghasilkan banyak hal yang produktif.

Kata Kunci : Sister Province, Yogyakarta, Kyoto, paradiplomasi, transnasional

Abstract

Paradiplomacy is a diplomatic relationship carried out by non-state actors. Paradiplomacy is a major part of contemporary international relations. This paper was written to complement the study of paradiplomacy which was still relatively new in the mid-1980s so that there was not much literature that was easily found in Indonesian. Paradiplomacy reinforces the assumption that international relations in the current era are not only filled with state actors, but also non-state actors. The form of paradiplomacy is reflected in the sister city collaboration between the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) and Kyoto Prefecture. The background of cooperation is very close to historical and municipal closeness between regional leaders so that social and cultural exchanges are born that bring mutual understanding closer. The cooperation between the Special Region of Yogyakarta and Kyoto has become one of the Sister Province collaborations which is said to be quite productive and has resulted in many beneficial effects for both parties. The paper aims to examine the implementation of cooperation from 2015 to 2020 in the midst of the Covid-19 pandemic situation. The author uses a descriptive-analytic method that allows the researcher to describe or give an overview of the object under study through the data or information that has been collected as it is. The author uses data from 2015-2020. The author assumes that the Sister City collaboration between DIY and Kyoto produces many productive things.

Keywords : Sister Province, Yogyakarta, Kyoto, Paradiplomacy, Transnational

¹ Habib Alfarisi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Potensi Utama Medan. Email: habibalfarisi9@gmail.com

PENDAHULUAN

Liberalisme merupakan salah satu perspektif dalam HI yang memberikan kebebasan kepada para aktor untuk bertindak berdasarkan rasional mereka untuk mengejar target dan tujuan masing-masing (Jackson dan Sorenson, 1999). Liberalisme juga merupakan salah satu perspektif HI yang tua. Liberalisme dalam HI muncul akibat trauma dari Perang Dunia I yang meluluhlantakkan Eropa saat itu. Karena adanya tragedi kemanusiaan tersebut, Presiden Amerika Serikat saat itu yang bernama Woodrow Wilson mengusulkan sebuah ide agar membentuk sebuah organisasi internasional yang bernama Liga Bangsa Bangsa yang bertujuan untuk mencegah konflik seperti Perang Dunia I terjadi lagi.

Liberalisme memandang bahwa hubungan internasional merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dengan efektif untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pihak yang terlibat dalam hubungan internasional tersebut. Kerjasama dalam hubungan internasional kemudian dianggap menjadi kunci liberalisme untuk mendapatkan keuntungan secara damai dan tanpa harus melukai pihak-pihak lain. Kerjasama kemudian memiliki peran penting dalam perspektif ini. Menurut Smith (Dunne, 2012), asas keterbukaan akan menjadi katalisator kerjasama yang nantinya dapat menguntungkan kedua pihak

Hubungan internasional telah mengalami perubahan paradigma semenjak akhir Perang Dunia II. Hubungan internasional sendiri bukan lagi sesuatu hubungan yang hanya dapat dijalin atau dilaksanakan oleh aktor yang bernama negara (Mukti, 2013), melainkan dapat juga dijalin atau dilaksanakan oleh aktor yang bukan berupa negara sekalipun. Kemudian muncul istilah hubungan transnasional atau hubungan yang menembus dan melewati batas-batas negara, seperti yang disebutkan oleh Mukti dalam bukunya Paradiplomasi (Mukti, 2013). Hubungan transnasional sendiri menurut Mukti dapat diartikan sebagai hubungan yang dilakukan oleh aktor non negara berupa individu, kelompok individu yang di mana cakupan dari hubungan tersebut adalah melintasi atau melewati batas-batas negara (Mukti, 2013).

Hubungan transnasional dapat kemudian diartikan sebagai hubungan yang diadakan demi mengisi dan memenuhi kepentingan masing-masing dari aktor-aktor non negara yang terlibat dalam hubungan tersebut dan melakukan hubungan tersebut sesuai dengan otoritas dan peraturan

negara masing-masing dan tidak boleh melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh negara masing-masing.

Istilah hubungan transnasional tersebut yang dimaknai sebagai paradiplomasi. Istilah paradiplomasi sendiri merupakan singkatan dari *Parallel Diplomacy*, seperti yang disebutkan oleh Soldatos pada tahun 1982 dalam Paradiplomasi oleh Mukti (Mukti, 2013). Paradiplomasi sendiri dapat diartikan sebuah proses diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor-aktor seperti pemerintah suatu daerah, provinsi atau bahkan pemerintah kota dan bisa juga pihak individu atau kelompok individu swasta dengan pihak lainnya yang bukan negara (Mukti, 2013).

Paradiplomasi bertujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing dan dibentuk berdasarkan kesamaan visi atau misi atau masalah yang ada dan dengan bersama-sama berusaha mencari solusi dari permasalahan yang ada dan guna mendapatkan kepentingan masing-masing.

Kemunculan gelombang paradiplomasi dan transparansi serta hubungan transnasional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu dari efek gelombang demokratisasi yang ada di seluruh dunia (Mukti, 2013). Mukti dalam bukunya yang berjudul Paradiplomasi menekankan bahwa dengan adanya gelombang demokratisasi di dunia, asas transparansi dan keterbukaan serta akuntabilitas menjadi asas-asas dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing aktor sebelum memasuki hubungan internasional sehingga terdapat sebuah lingkungan hubungan yang produktif serta bersahabat.

Hadirnya demokrasi di dunia juga mengubah sudut pandang setiap orang yang ada di seluruh dunia untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terdapat dalam hubungan yang dijalin antar pihak dari lain negara. Hal tersebut mendorong mereka untuk juga memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada para aktor non negara yang selama ini diremehkan perannya dalam hubungan internasional agar dapat berkontribusi secara aktif dalam paradigma dan dinamika hubungan internasional era modern. Hal tersebut juga memicu terjadinya paradiplomasi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Penelitian ini kemudian akan menjelaskan beberapa pertanyaan seperti bagaimana jalannya kerjasama antara DIY dan Kyoto dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan bagaimana masa depan dari kerjasama yang sudah berlangsung selama hampir 4 dekade tersebut.

Penelitian tentang paradiplomasi sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti dari negeri. Peneliti yang paling terkenal adalah Penelitian pada tahun 1980 oleh Ducacheck yang menjadi pionir dalam diskursus paradiplomasi dalam hubungan internasional. Penelitian lain dilakukan oleh Soldatos yang kemudian memberi nama dari hubungan transnasional yang pernah dikenalkan oleh Ducacheck menjadi paradiplomasi (Duchacek, Publius, States, & Autumn, 2018).

Penelitian menurut Paradiplomasi memengaruhi hingga memungkinkan transformasi model tata kelola pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik yang membuka peran pemerintah daerah untuk turut andil dalam memajukan kepentingan nasional Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah sebagai otoritas hukum menjadi legalitas pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam mengejar pembangunan dengan melihat sejumlah potensi yang mereka miliki.

Peran pemerintah daerah yang kompleks ternyata bukan sekedar dalam menjadi aktor lokal saja akan tetapi bisa menjadi aktor hubungan internasional atau dikenal dengan 'paradiplomasi'. Implementasi hubungan internasional paradiplomasi misalnya melakukan kerjasama investasi asing untuk menarik investor menanamkan modalnya di daerah.

Makassar merupakan salah satu kota yang telah mengimplementasikan paradiplomasi untuk membentuk smart city dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dicirikan oleh integritas, akuntabilitas, dan transparan. Program *smart city* di Makassar merupakan program strategis yang mendapat pujian dari sejumlah pihak seperti gubernur hingga menteri, bahkan Konsulat Amerika Serikat memberikan apresiasi terhadap program tersebut. Oleh karena itu, disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi setiap kota dan kabupaten serta propinsi seharusnya menciptakan kota pintar berbasis teknologi informasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan inovatif.

Paradiplomasi misalnya bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan kota dengan belajar dari kota lain lewat kerjasama kota kembar. Penelitian oleh Adiwibowo dan Putri (2016) menemukan bahwa kerjasama kota kembar dapat meningkatkan efisiensi tata kelola dan kebijakan pemerintah daerah secara lebih intensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yakni adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau informasi yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian ini akan berfokus kepada kerjasama yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan juga akan menganalisis beberapa hambatan yang dihadapi oleh kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama Sister Province tersebut. Metode ini juga akan menjelaskan secara rinci kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun tersebut dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, kemanusiaan dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Daerah Jalan Menuju Paradiplomasi

Otonomi daerah memiliki sejarah panjang di Indonesia dan merupakan salah satu unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik Indonesia. Otonomi daerah dapat dipahami sebagai proses pemberian kekuasaan atau otoritas kepada masing-masing daerah atau provinsi, yang ada di Indonesia untuk mengurus daerahnya (Mukti, 2013).

Secara luas, otonomi daerah merupakan sebuah proses desentralisasi yang dalam proses tersebut, pemerintah daerah masing-masing diberikan sebuah otoritas atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengurus, mempertahankan dan membangun serta mengembangkan daerah masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah masing-masing selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pusat.

Selain daripada hal tersebut, pemerintah daerah juga memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan daerah masing-masing berdasarkan perundang undangan yang berasal dari pemerintahan pusat. Otonomi daerah sendiri merupakan suatu hak sekaligus kewajiban pemerintah daerah.

Otonomi daerah sendiri merupakan suatu hak sekaligus kewajiban pemerintah daerah. Dipandang sebagai hak karena pemerintah daerah akhirnya memiliki kesempatan dan juga otoritas untuk mengatur serta mempertahankan keutuhan daerah masing-masing sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku di daerah masing-masing.

Dipandang sebagai kewajiban karena setiap pemerintah daerah wajib menyusun peraturan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pusat dan tidak bertentangan kepada UU Indonesia dan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah daerah melalui otonomi daerah yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

Otonomi daerah memberikan pengaruh serta efek yang cukup luas bagi perkembangan dan pertumbuhan masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Otonomi daerah juga membuka peluang kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah masing-masing. Selain kerjasama antar daerah, otonomi daerah yang ditetapkan di Indonesia juga memberikan kesempatan bagi setiap daerah yang terlibat dalam otonomi tersebut untuk menjalin kerjasama dengan pihak asing (Mukti, 2013).

Hal tersebut tertuang pada pasal 22 tahun 1999 (Mukti, 2013), yang menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki hak atau otoritas untuk menjalin kerjasama dengan pihak asing pemerintah maupun non pemerintah atau swasta demi meningkatkan kesejahteraan daerah dan memajukan daerah masing-masing. Hal tersebut yang menjadi dasar dari paradiplomasi yang ada di Indonesia.

Paradiplomasi seperti yang dijelaskan oleh pasal 22 tahun 1999 bukanlah merupakan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri (Mukti, 2013). Namun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwasannya globalisasi yang ada pada masa sekarang menjadi alasan yang terkuat mengapa setiap daerah yang ada di Indonesia harus membuka dirinya kepada kerjasama luar negeri seperti yang disebutkan dan dijelaskan oleh pasal 22 tahun 1999.

Tentu jika suatu daerah menutup diri dari kerjasama transnasional, yang merupakan salah satu wewenang daerah, maka daerah tersebut akan tertinggal secara ekonomi maupun politik dan akan terdapat kesenjangan ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, sangat krusial bagi setiap daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri baik dengan pihak pemerintah dari negara lain maupun pihak swasta dari negara lain untuk memajukan negaranya.

Kerjasama Transnasional

Kerjasama transnasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh aktor non negara, seperti contohnya adalah Sister City (Mukti, 2013). Berbeda dengan kerjasama internasional, yang

hanya dilakukan oleh negara, maka kerjasama transnasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh aktor atau entitas yang bukan merupakan negara, yang dilakukan melintasi batas-batas negara.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang mendasar antara kerjasama transnasional dan kerjasama internasional. Secara bahasa kata transnasional berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu Trans dan Natio. Trans artinya melewati, menyeberangi sedangkan Natio artinya bangsa.

Kata transnasional dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang melintasi atau melewati negara-negara. Sedangkan kata internasional berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu kata Inter dan Natio. Kata Inter berarti di antara atau among. Sementara kata Natio berarti negara atau bangsa. Kata Internasional dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dilakukan antara bangsa-bangsa dan bangsa atau negara tersebut merupakan "Sole Actor" dari kegiatan yang dilakukan.

Adanya kerjasama transnasional membuka peluang sebesar-besarnya bagi para aktor non negara untuk mengembangkan diri dan memajukan diri dengan menjalin hubungan transnasional dengan aktor yang dari pemerintah negara lain atau buka dari pemerintah.

Kerjasama transnasional tentu telah membuka akses terhadap kerjasama Pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan bahkan politik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk dari kerjasama yang akan penulis jelaskan secara rinci adalah kerjasama Sister Province DIY dengan Kyoto, yang dinilai merupakan salah satu kerjasama Sister Province paling produktif di Indonesia.

Sejarah Kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta - Kyoto

Hubungan kerjasama Kyoto dengan Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang merupakan salah satu kasus yang unik dari hubungan kerjasama yang pernah terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan unik karena hubungan pribadi antara kedua pemimpin yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Menurut Mukti disebutkan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX yang pada masa Perang Dunia II menjabat sebagai pemimpin Yogyakarta sudah bersahabat dekat dengan Yukio Hayashida (Mukti, 2013) yang dahulunya merupakan tentara Jepang yang bertugas di Yogyakarta dan kelak menjadi gubernur Kyoto. Karena kedekatan

hubungan antara kedua pemimpin tersebut, maka kerjasama antara provinsi atau kota yang berada di negara berlainan dapat dijalin dengan mudah.

Selain daripada hal tersebut, pada saat bertugas, Yukio Hashida sudah mengetahui seluk beluk kota Yogyakarta, sehingga memudahkannya untuk mengetahui potensi yang dapat dimanfaatkan dalam kerjasama tersebut (Mukti, 2013) dan dapat Menyusun sebuah strategi yang bukan hanya menguntungkan pihak Jepang, namun juga pihak Indonesia. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam terciptanya kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto yang kemudian menjadi salah satu kerjasama antar daerah dan juga antar kota yang paling produktif.

Kesamaan fakta historis juga menjadi salah satu penyebab mengapa kerjasama terjalin antara kedua provinsi ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Kyoto dan Yogyakarta dahulunya pernah menjadi ibu kota dari negara masing-masing, yang membuatnya kaya akan nilai perjuangan dan historis (Mukti, 2013). Dengan adanya kerjasama tersebut, tentu hal tersebut akan berkontribusi dengan sangat besar dalam mempertahankan nilai-nilai historis dan perjuangan dari masing-masing negara.

Kyoto dan Yogyakarta juga menjadi kota dengan pusat budaya dan pusat Pendidikan di masing-masing negara (Mukti, 2013). Potensi tersebut tentu merupakan hal yang luar biasa yang harus dimanfaatkan demi kepentingan bersama. Kerjasama yang ada antara DIY dan Kyoto juga bertujuan salah satunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempertahankan cagar budaya yang ada antara kedua negara., mengingat pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang krusial dalam kehidupan suatu bangsa dan juga penting bagi masa depan suatu bangsa.

Karena adanya kesamaan fakta historis, status pendidikan dan juga kebudayaan, yang ada antara kedua provinsi baik dari Indonesia maupun dari Jepang, maka dibentuklah sebuah kerjasama Sister Province dan diresmikan pada 16 Juli 1985 (Mukti, 2013). Kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto merupakan salah satu kerjasama Sister Province paling tua di Indonesia dan juga merupakan kerjasama, yang selalu diperpanjang dan masih dijalin sampai hari ini.

Bidang kerjasama yang dijalin oleh kedua provinsi tersebut sangat beragam. Mulai dari bidang pertanian, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan bahkan kemanusiaan. Dari tahun 1986 sampai

tahun 2012, terdapat berbagai kegiatan dan hal-hal yang dilakukan oleh kedua provinsi tersebut dalam mewujudkan kerjasama Sister Province. Dalam bidang pertanian, Kyoto mengirim beberapa tenaga ahli pertanian untuk bertukar teknologi dengan Indonesia (Mukti, 2013).

Dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan, perwakilan Kyoto selalu rutin mengadakan pertukaran pelajar dari DIY ke Kyoto dan juga mengadakan lomba pidato bahasa Jepang di DIY (Mukti, 2013). Dalam bidang kemanusiaan, Kyoto mengirimkan bantuan tunai dan non tunai kepada DIY di saat terdapat gempa di Yogyakarta pada tahun 2006. Perwakilan DIY juga dikirim ke Jepang dalam misi pertukaran budaya (Mukti, 2013) dengan mengadakan pameran Batik agar masyarakat luar negeri semakin mengenal budaya Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan prefektur Kyoto telah banyak melakukan hal produktif dan menguntungkan kedua belah pihak dalam kurun waktu 3 dekade. Kyoto sendiri dinilai telah menjadi sahabat dekat dari Daerah Istimewa Yogyakarta, karena selalu berusaha menjaga hubungan diplomatik yang baik dan bersahabat dengan memberikan beberapa bantuan di saat DIY terkena bencana agar dapat pulih dalam waktu yang lebih cepat. DIY juga telah menjadi partner strategis dari Kyoto, karena tanpa Daerah Istimewa Yogyakarta, Jepang akan kehilangan tempat untuk bertukar budaya dan belajar hal baru seperti adanya pertukaran teknologi dan lain sebagainya.

Selain daripada hal-hal yang sudah disebutkan di atas, satu tahun sebelum terjadi bencana gempa di DIY, diadakan sebuah acara peringatan 20 tahun hubungan sister Province DIY-Kyoto di Yogyakarta dan di Kyoto (Mukti, 2013). Acara yang diadakan beragam, seperti lomba pidato bahasa Jepang, pameran kesenian dan kebudayaan dari masing-masing pihak dan penguatan kerjasama yang akan dilakukan kedepannya.

Kerjasama DIY-Kyoto Tahun 2015

Kerjasama DIY dan Kyoto merupakan kerjasama yang sangat menguntungkan antara kedua belah pihak. Baik DIY dan Kyoto mendapatkan banyak hal yang tak ternilai dari adanya kerjasama yang sudah berlangsung hampir 4 dekade ini. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai jalannya kerjasama antara DIY dan Kyoto dari tahun 2015 sampai tahun 2020 atau sampai tahun di mana tulisan ini ditulis.

Tahun 2015 menjadi momentum yang menyegarkan bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kerjasama tersebut, karena pada tahun 2015, kerjasama antara DIY dan Kyoto akan genap berumur 30 tahun (jogjaprovo.go.id). Momentum tepat 3 dekade hubungan kerjasama antara DIY dan Kyoto digunakan untuk penegasan kembali hubungan persahabatan antara kedua daerah tersebut.

Hal tersebut menandakan bahwa kerjasama yang dilakukan selama 30 tahun telah menghasilkan banyak hal yang menguntungkan kedua belah pihak di berbagai bidang kehidupan yang berkontribusi kepada kemajuan dan kemakmuran dua daerah yang berada di negara yang berbeda. Meskipun berbeda secara budaya dan bahasa, hal tersebut tentu bukan menjadi halangan bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan dan menjalin hubungan persahabatan yang berumur 3 dekade tersebut.

Selain daripada hal tersebut, delegasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh gubernur DIY yang bernama Sultan Hamengkubuwono X mengadakan kunjungan kerja ke Kyoto pada 24-30 Agustus 2015 (jogjaprovo.go.id, 2015). dalam rangka penguatan hubungan kerjasama antara DIY dengan Jepang. Dalam kunjungan tersebut, delegasi DIY dan pihak Kyoto menghasilkan sebuah *Minute of Discussion*, yang merupakan dokumen mengenai penguatan kerjasama yang disepakati dalam bidang pendidikan, pariwisata dan juga kebudayaan. Selain daripada penguatan kerjasama dengan Kyoto, kunjungan kerja tersebut memberikan peluang terbukanya akses kerjasama yang baru dengan prefektur Yamanashi.

Selain daripada hal tersebut, diadakan juga acara JJW 2015 atau Jogja-Japan Week yang berlangsung pada September 2015 (jogjadaily.com, 2015). JJW 2015 diisi dengan berbagai acara pertukaran budaya, baik budaya Indonesia dan juga Jepang, seperti adanya kursus membatik, budaya Jepang dan lain sebagainya (jogjadaily.com, 2015). Selain daripada acara pertukaran budaya, diadakan juga berbagai macam seminar ilmiah yang berfungsi menambah wawasan serta pengetahuan orang Indonesia.

Selain daripada hal tersebut, investasi tumbuh dengan subur pada tahun 2015 (Wicaksono, 2018). Dengan adanya pertemuan rutin yang diadakan setiap tahun oleh DIY dan juga Kyoto, hal tersebut dapat menjembatani hubungan bisnis antara kedua belah pihak dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bisnis antara kedua belah pihak. Menurut data yang didapatkan

dari tesis Wicaksono, disebutkan bahwa perkembangan nilai investasi yang ada di DIY mencapai 2,9 Miliar Dollar Amerika Serikat (Wicaksono, 2018). Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2014, yang semulanya berjumlah 2,7 miliar Dollar AS. Setahun berikutnya tepatnya pada tahun 2016, kerjasama antara DIY dan juga Kyoto juga menghasilkan berbagai macam hal yang produktif. Salah satunya adalah di bidang kebudayaan. Tahun 2016 merupakan tahun yang sangat membanggakan bagi Indonesia, karena Indonesia yang diwakilkan oleh DIY mempunyai kesempatan untuk memamerkan lukisan hasil karya anak bangsa pada pameran seni yang diadakan di Kyoto pada September 2016 (krjogja.com, 2016).

Tercatat ada sekitar 30 lukisan yang terpilih yang akan dibawa ke Kyoto dari pameran lukisan yang sebelumnya diadakan di Yogyakarta. Lukisan yang terpilih tersebut juga akan dipamerkan di Kyoto. Lomba melukis yang awalnya diadakan di Yogyakarta merupakan hasil dari kerjasama antara DIY dan juga Kyoto dan merupakan salah satu perwujudan dari salah satu misi kebudayaan, yaitu saling menguatkan dalam hal seni rupa.

Lomba melukis yang mengusung tema “Jogja Omahku” diikuti oleh 400 peserta dari seluruh daerah DIY dengan tingkatan dari TK sampai SMA (krjogja.com, 2016). Kemudian para peserta beradu kemampuan dengan peserta pelukis lainnya agar lukisannya dapat terpilih dan dipamerkan di Kyoto.

Selain daripada hal tersebut, Prodi bahasa Jepang Universitas Gajah Mada yang terletak di Yogyakarta dan juga merupakan salah satu universitas tertua di Indonesia, juga menjalin kerjasama dengan universitas yang berada di Kyoto (fib.ugm.ac.id, 2016) dan mencetuskan program beasiswa bagi para mahasiswa Universitas Gajah Mada salah satunya adalah adanya program beasiswa Kyoto Prefecture bagi para mahasiswa UGM yang terpilih. Bagi individu yang terpilih, akan mendapatkan berbagai keuntungan, salah satunya adalah pembiayaan studi sastra Jepang di Universitas Gajah Mada. Selain daripada program beasiswa.

Pemberian beasiswa tersebut dapat menjadi sebuah katalisator khususnya di bidang pendidikan di daerah Yogyakarta, mengingat hal tersebut juga akan menambah semangat mahasiswa untuk menuntut ilmu tanpa harus memikirkan biaya yang kerap menjadi hambatan bagi para mahasiswa.

Pihak Kyoto juga secara intensif melakukan pelatihan bahasa Jepang dengan pihak Universitas Gajah Mada (fib.ugm.ac.id, 2016). Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang orang Indonesia. Tentu dengan adanya beasiswa dan berbagai program pelatihan bahasa Jepang akan membantu orang Indonesia untuk mengenal Jepang dengan lebih baik dan dapat berkontribusi terhadap stabilisasi hubungan *Sister Province* antara DIY dan Kyoto.

Tahun 2016 juga menjadi tahun yang baik bagi perindustrian otomotif di DIY dan juga di Kyoto. Hal tersebut karena adanya pelatihan yang dilakukan oleh pihak Kyoto terhadap pihak DIY (Wicaksono, 2018). Pelatihan tersebut merupakan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi individu dalam bidang otomotif, pelistrikan dan lain sebagainya yang dapat berkontribusi pada kemajuan industri di DIY.

Selain daripada hal tersebut, ekspor DIY ke Yogyakarta dalam bidang perindustrian meningkat pesat. Pada tahun 2016, angka ekspor mencapai 18.629.535 Dollar AS (Wicaksono, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa hubungan industri antara Yogyakarta dan Kyoto sudah sangat erat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, pihak DIY dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang industri otomotif dan di satu sisi, pihak Kyoto mendapatkan produk ekspor yang berkualitas dari DIY.

Bidang pertanian juga menjadi salah satu bidang yang diuntungkan dalam kerjasama tersebut. Tercatat pada tahun 2016, terdapat pengiriman tenaga ahli dari Jepang dalam bidang pertanian (Wicaksono, 2018). Pihak DIY juga mengirim beberapa petugas untuk mempelajari budaya holikultura di Kyoto (Wicaksono, 2018). Dengan adanya tenaga ahli dari Jepang yang dikirim di Indonesia, hal tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi tenaga ahli dalam pengaturan fungsi lahan di DIY agar dapat menyelematkan dan mempertahankan lingkungan yang ada di DIY.

Setelah UGM yang menandatangani kerjasama dengan Kyoto pada tahun 2016, maka tahun 2017 menjadi giliran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk melaksanakan kerjasama dengan Universitas Kyoto (eng.ummy.ac.id, 2017). Tanggal 30 November 2017 menjadi salah satu hari yang bersejarah bagi UMY, karena pada hari itu, fakultas Teknik UMY menandatangani sebuah MoU dengan pihak universitas Kyoto (eng.ummy.ac.id, 2017). MoU tersebut merupakan dasar dari perjanjian

kerjasama yang akan dibuat antara kedua belah pihak yang akan terlibat dalam suatu ikatan kerjasama.

Pada MoU yang dicetuskan pada November 2017 antara fakultas Teknik UMY dengan universitas Kyoto disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang akademik (eng.ummy.ac.id, 2017), seperti adanya pertukaran mahasiswa, staff dan juga dosen dari UMY ke Universitas Kyoto dan begitu juga sebaliknya. Selain daripada hal tersebut, kedua belah pihak juga sepakat akan melaksanakan berbagai agenda internasional (eng.ummy.ac.id, 2017), seperti Joint Research sampai Workshop internasional guna meningkatkan ketrampilan baik para pendidik maupun para mahasiswa dari kedua belah pihak yang akan terlibat dalam kerjasama tersebut.

Kerjasama yang akan dijalin tersebut akan berlangsung selama 5 tahun (eng.ummy.ac.id, 2017). Setiap tahunnya akan dilakukan pertukaran pelajar, staff dan juga tenaga dosen guna dapat mempertahankan hubungan persahabatan yang telah dibentuk sebelumnya. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta pemahaman masing-masing pihak terhadap bidang keilmuannya dan dapat menjadi wadah pertukaran teknologi, mengingat sebuah fakta bahwa Jepang dikenal sebagai negara macan Asia dan merupakan negara Asia dengan tingkat perindustrian paling tinggi.

Selain daripada hal tersebut, diadakan juga lomba melukis tahunan seperti pada tahun 2016. Namun bedanya pada tahun 2017, peserta yang berpartisipasi hanya berjumlah 198 orang (krjogja.com, 2017). Lomba melukis juga diikuti oleh para siswa dari jenjang TK sampai SMA dan hanya 30 lukisan terpilih yang akan dipamerkan di Kyoto dengan lukisan dari Jepang lainnya. Tema yang dipilih untuk acara melukis tahun 2017 adalah Harapanku. Para peserta diwajibkan untuk melukis gambar sesuai dengan tema yang diberikan.

Acara tahunan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari komitmen kerjasama kebudayaan antara Kyoto dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut tentunya berkorespondensi dengan status Yogyakarta dan Kyoto sebagai pusat budaya Indonesia dan juga Jepang.

Tahun 2018 juga menjadi hal yang krusial bagi kerjasama DIY dan Kyoto. Pada tahun ini, wakil gubernur Kyoto, yang bernama Shuichi Yamauchi berkunjung ke Yogyakarta (Jogja.tribunnews.com,

2018) dalam rangka kunjungan kerja untuk menjaga serta memperatahkan hubungan diplomatik antara DIY dan Kyoto pada September 2018. Hubungan persahabatan yang sudah hampir berlangsung selama 35 tahun tersebut merupakan krusial bagi kedua pihak, karena berkat adanya hubungan kerjasama antara DIY dengan Kyoto, berbagai kegiatan dan usaha seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata dapat terwujud. Hal tersebut juga tidak lepas dari komitmen kedua belah pihak dalam kerjasama Sister City selama hampir 4 dekade terakhir.

Pihak Kyoto juga berencana akan mengadakan sebuah acara penyambutan delegasi pihak DIY yang akan diadakan pada tahun 2020 (Jogja.tribunnews.com, 2018). Tentu dengan adanya kunjungan diplomatik yang rutin dilakukan oleh kedua belah pihak akan menambah kedekatan serta harmonisasi pada hubungan persahabatan antara kedua provinsi tersebut. Inisiatif dari pemerintah Kyoto tersebut disambut baik oleh pemerintah DIY yang nantinya akan melakukan kunjungan kerja ke Kyoto untuk semakin memperkuat hubungan tersebut.

Selain daripada hal tersebut, pihak Kyoto juga menginginkan karya seni dari Yogyakarta dapat dibawa langsung dan dipamerkan di Kyoto (Jogja.tribunnews.com, 2018). Jika pada tahun-tahun sebelumnya, hanya ada lomba lukis yang diadakan oleh DIY dan juga Kyoto, maka untuk tahun-tahun ke depannya, pemerintah DIY dan juga Kyoto akan mengikutisertakan pengrajin tenun (Jogja.tribunnews.com, 2018) dalam pameran karya seni yang dilakukan tiap tahunnya di Kyoto sebagai salah satu perwujudan tujuan kerjasama budaya dari hubungan Sister Province.

Selain hal tersebut, pertemuan yang diadakan pada September 2018 lalu juga membahas masuknya investor dari Kyoto ke Daerah Istimewa Yogyakarta (Jogja.tribunnews.com, 2018). Sultan Hamengkubuwono X selaku pemimpin DIY merencanakan akan mengalihkan serta mengarahkan pembangunan dari dana investasi yang masuk ke pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo. Kabar akan masuknya para investor dari Kyoto merupakan berita yang membanggakan dan juga menyenangkan bagi perkembangan dan kemajuan Daerah Yogyakarta.

Pada tahun 2019 diadakan Jogja-Japan Week yang merupakan sebuah acara pertukaran budaya dan acara persahabatan yang dilaksanakan dua tahun sekali dalam rangka mempertahankan serta memperkuat persahabatan antara dua provinsi

tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat Kyoto yang kemudian menghasilkan sebuah penguatan kerjasama yang baru guna memperkuat dan mendekatkan hubungan kedua belah pihak. Pertemuan tersebut diadakan di Kraton Yogyakarta pada September 2019.



Perwakilan Masyarakat Kyoto di Kraton Yogyakarta

Sumber: FB Jogja Japan Week 2020



Penandatanganan Dokumen Kerjasama

Sumber: FB Jogja Japan Week 2020

TAHUN 2020

Tahun 2020 menjadi tahun yang kurang menyenangkan bagi hubungan kerjasama Sister Province DIY dan Kyoto. Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19 yang mewabah sepanjang tahun 2020. Terdapat banyak sektor kehidupan yang hancur dan tak berdaya akibat adanya pandemi yang mewabah di seluruh dunia. Pandemi sendiri merupakan sebuah keadaan wabah yang sudah tidak dapat dikendalikan dan penyebarannya sudah mencapai skala global (alodokter, 2020). Tentu pandemic menjadi

ancaman yang sangat mengerikan bagi salah satunya adalah kerjasama antara DIY dan Kyoto.

Tahun 2020 seharusnya menjadi momentum yang membanggakan antara kedua belah pihak, karena tepatnya pada tahun ini, hubungan persahabatan antara DIY dan Yogyakarta genap berusia 35 tahun. Tentu adanya pandemi tersebut membuat semuanya terganggu atau terdistorsi. Rencana kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah DIY ke Kyoto harus diundur atau bahkan dibatalkan. Penulis berasumsi demikian karena tidak ditemukan satu pun kabar atau berita yang berbicara mengenai kunjungan kerja yang dilakukan oleh DIY ke Kyoto sesuai dengan rencana yang ada pada tahun 2018.

Hal tersebut juga didukung dengan sebuah fakta bahwasannya jumlah individu yang terinfeksi di Yogyakarta sudah mencapai 4.056 pada akhir September 2020 (google.com, 2020). Pemerintah Daerah Yogyakarta juga menerapkan Micro Lockdown untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 yang mewabah di daerah tersebut (regional.kompas.com, 2020). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya presensi Covid-19 di daerah tersebut sudah membuat daerah tersebut terdistorsi sedemikian rupa sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya secara efektif.

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Kyoto. Kyoto sendiri mengalami penurunan gelombang infeksi yang sangat signifikan pada awal September 2020. Tercatat hanya sekitar 300 kasus baru setiap harinya di Kyoto (google.com, 2020). Bahkan pemerintah Jepang sudah mencabut status darurat Covid-19 sejak bulan Mei 2020 (internasional.kontan.co.id, 2020). Hal tersebut menandakan cepatnya pemulihan akibat pandemi yang disebabkan oleh virus Corona di Jepang, terutama di Prefektur Kyoto.

Presensi Corona yang hadir sepanjang tahun 2020 telah menjadi penghambat yang berarti bagi hubungan kerjasama antara Kyoto dan DIY tersebut. Karena adanya virus tersebut yang menyebabkan pandemi yang sangat masif, kunjungan kerja dan juga peringatan 35 tahun hubungan DIY-Kyoto menjadi terhambat atau bahkan akan dibatalkan sama sekali.

Hambatan Kerjasama DIY-Kyoto

Hambatan merupakan hal yang pasti terjadi dalam sebuah kerja sama, tak terkecuali kerja sama yang dilakukan oleh DIY dan Kyoto. Dari hasil penelitian dan penelusuran penulis, penulis menemukan

beberapa hambatan dalam kerjasama DIY dan Kyoto, sebagai berikut:

Sumber daya manusia memainkan peran yang strategis dalam penciptaan harmonisasi hubungan kerjasama DIY dan Kyoto. Sumber daya manusia dapat dimengerti sebagai agen atau pelaku yang dapat memberdayakan sumber daya alam demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Semakin bagus kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu entitas politik tertentu, maka semakin bagus dan semakin maju entitas tersebut baik secara politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Walaupun kerjasama membuka peluang untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama, tidak dapat dipungkiri juga bahwa sumber daya manusia juga terkadang menjadi hambatan yang berarti dalam proses kerjasama.

Hal tersebut ditemukan dalam kerjasama DIY dan Kyoto. Berdasarkan hasil penelitian Wicaksono, disebutkan bahwa kerjasama yang dijalin antara DIY dan Kyoto sering dianggap remeh dan hanya sekedar simbolis saja (Wicaksono, 2018). Hal tersebut terjadi karena kepala BKPM sering mengalami pergantian. Karena sering mengalami pergantian pimpinan BKPM, kebijakan yang diambil cenderung akan berubah secara drastis dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan lainnya. Di lain sisi, juga diketahui bahwasannya kebijakan yang diambil oleh pemerintahan DIY akan bergantung kepada BKPM. Kurangnya koordinasi dan pemahaman yang sama akan pentingnya hubungan DIY-Kyoto berkontribusi kepada hambatan yang ada.

Selain daripada hal tersebut, penguasaan bahasa asing yang minim di kalangan para pejabat yang memainkan peran penting dalam hubungan DIY dan Kyoto juga menjadi salah satu faktor (Wicaksono, 2018). Penguasaan minimal satu bahasa asing di kalangan para pejabat yang terlibat serta memainkan peran krusial dalam hubungan tersebut, merupakan hal yang sangat krusial mengingat dengan menguasai bahasa asing, akan memudahkan para pejabat untuk berkomunikasi dan berdiplomasi langsung. Namun Wicaksono berpendapat bahwasannya hal tersebut bisa saja dihindari dengan menyewa atau memasukkan tim penerjemah (Wicaksono, 2018), namun Wicaksono menegaskan bahwasannya langkah tersebut akan menghabiskan banyak biaya dan akan membebankan keuangan daerah.

Birokrasi

Birokrasi menurut Morstein Marx dapat diartikan sebagai jenis atau tipe dari suatu organisasi yang dijalankan serta dicetuskan oleh pemerintahan suatu negara yang berfungsi untuk menangani bagian tertentu dan agar dapat membantu menjalankan tugas kenegaraan (Santosa, 2008). Birokrasi dapat dikatakan sebagai sebuah bagian tertentu yang memiliki fungsi khusus dalam bagian tertentu dan diberikan kekuasaan sedemikian rupa agar dapat membantu tugas pemerintah.

Birokrasi memainkan peran yang penting dalam proses pemerintahan yang terjadi setiap harinya di suatu negara. Namun, kecenderungan yang sering terjadi adalah bahwasannya birokrasi yang ada cenderung berbelit-belit dan tidak efisien. Birokrasi yang ada bukan menghasilkan sebuah solusi dari masalah, namun sebaliknya: menambah masalah terhadap solusi yang diberikan.

Ketidakefisienan dari birokrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga dapat ditemukan di birokrasi DIY (Wicaksono, 2018). Proses yang rumit dan sulit yang harus ditempuh untuk menciptakan atau memproses suatu perkara memakan waktu yang sangat lama dan berbelit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, bahkan untuk membentuk suatu kerjasama Sister Province seperti DIY dan Kyoto, memerlukan waktu hingga berbulan-bulan (Wicaksono, 2018). Hal tersebut tentu sangat tidak efisien dan memakan banyak waktu untuk dapat diproses. Tentu proses yang memakan waktu hingga berbulan-bulan akan membuang banyak keuntungan. Hal-hal produktif yang semestinya sudah dicapai jika kerjasama langsung diadakan, akan tidak tercapai dan terbuang dengan sia sia.

Birokrasi yang harus dilalui untuk membentuk kerjasama tersebut umumnya harus melalui pemerintahan daerah lalu Kementerian dalam Negeri dan juga Luar Negeri (Mukti, 2013). Kementerian Dalam dan Luar Negeri juga diikutsertakan karena kerjasama Sister Province seperti DIY dan Kyoto terletak pada daerah dalam dan luar negeri. Lamanya waktu menunggu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terbukti sangat tidak efektif bagi birokrasi yang dijalankan pemerintahan Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia seharusnya tidak mempersulit inisiatif yang dilakukan oleh setiap daerah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri, karena hal tersebut dapat membantu dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan daerah masing-masing, ditambah lagi setiap daerah memiliki otonomi yang menjadikannya

sebagai agen yang bertanggung jawab atas daerahnya sendiri.

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu hambatan dalam kerjasama yang dialami baik oleh DIY maupun Kyoto. Kehadiran pandemic tersebut membuat segala kegiatan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak ditunda atau terancam dibatalkan. Hal tersebut juga dapat menghambat kinerja para pejabat yang terlibat dengan penting dalam hubungan kerjasama tersebut.

Pandemi Covid-19 juga memaksa para pejabat untuk bekerja dari rumah, sehingga keaktifan dalam bekerja berkurang sangat drastis. Para pejabat juga tidak bisa bertemu secara tatap muka. Bahkan jika terpaksa diadakan pertemuan tatap muka, maka para partisipan yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut tidak bisa melebihi dari jumlah individu yang sudah ditetapkan dalam protokol Kesehatan dan juga harus selalu menjaga jarak dengan para individu yang lainnya.

Ditambah lagi kebijakan Lockdown yang ditetapkan oleh DIY pada masa pandemi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga beberapa fasilitas atau birokrasi pemerintah harus ditutup agar dapat mendukung dan melaksanakan kebijakan Lockdown tersebut. Selain hal tersebut, keadaan pandemi Covid-19 yang masih cukup parah di DIY sendiri membuat para pejabat dan para pembuat kebijakan yang ada harus berfokus kepada permasalahan yang lebih genting, sehingga pembicaraan mengenai kerjasama serta kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama harus dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat menyelamatkan para warga yang terjebak di tengah gelombang pandemi yang makin hari semakin meninggi.

Pandemi Covid-19 juga menguras keuangan daerah termasuk DIY, karena keuangan tersebut harus digunakan secara efektif untuk melawan dan menekan angka penyebaran Pandemi Covid-19, sehingga melakukan kunjungan kerja ke Kyoto untuk membicarakan penguatan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut bukanlah merupakan sebuah ide yang baik maupun yang ideal. Terdapat hal-hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum dapat membicarakan perjanjian kerjasama yang lebih lanjut dengan perwakilan Kyoto.

Namun di lain sisi, kedua belah pihak kehilangan sebuah kesempatan dan juga momentum untuk

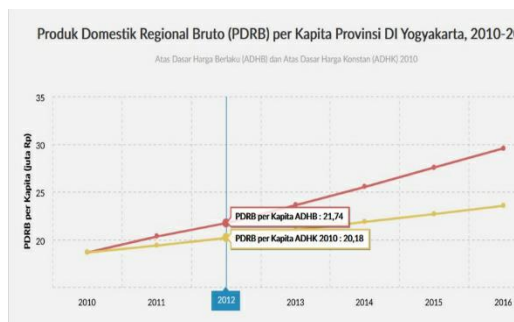
membicarakan sebuah rencana mengenai penguatan kerjasama di berbagai bidang kehidupan yang dapat menguntungkan baik DIY maupun Kyoto. Ditambah lagi tahun 2020 merupakan tahun di mana kerjasama DIY dan Kyoto tepat berumur 35 tahun.

Masa Depan Kerjasama

Hubungan kerjasama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto merupakan hubungan kerjasama yang epik, karena dapat bertahan hampir selama 4 dekade lamanya. Hubungan DIY dengan Kyoto sudah seperti saudara dan saling membutuhkan satu sama lain. DIY membutuhkan Kyoto sebagai kakak dan Kyoto membutuhkan DIY sebagai adik. Berdasarkan analisis yang sudah penulis paparkan sebelumnya, masa depan kerjasama DIY-Kyoto akan selalu menjadi baik jika kedua belah pihak saling memutuskan untuk melanjutkan kerjasama di berbagai bidang yang menyokong kehidupan. Berawal dari hubungan pribadi antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan Yukio Hashida yang mengabdikan sebagai pasukan Jepang pada masa pra kemerdekaan Indonesia bertransformasi menjadi kerjasama diplomatik yang intensif dan berkepanjangan.

Langkah pertama yang harus diperkuat oleh kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut adalah kerjasama ekonomi. Pihak DIY harus dapat memancing masuknya investor dari Kyoto dan begitu juga sebaliknya. DIY juga harus dapat membangkitkan UMKM yang ada di provinsinya dengan mendatakan dan memberikan pelatihan ahli dari Kyoto, yang notabene lebih maju secara ekonomi dibandingkan DIY agar dapat bersaing di pasar global dan meningkatkan Produk Domestik Bruto Regional DIY.

DIY sendiri merupakan daerah dengan pertumbuhan produk domestik bruto yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti pada data berikut:



Sumber: lokadata.beritagar.id

Hal tersebut menunjukkan bahwa DIY memiliki penghasilan serta iklim investasi yang stabil serta bersahabat. DIY kemudian dapat menggunakan dana yang didapat dari investasi untuk membangun fasilitas umum seperti bandara internasional, jalan tol, fasilitas yang dapat menunjang pariwisata dan lain sebagainya.

Di lain sisi, para investor lokal dari DIY juga harus diarahkan untuk berinvestasi di Kyoto. Kyoto sendiri merupakan kota pusat budaya dan juga kota pariwisata di Jepang. Berinvestasi di bidang pariwisata di Kyoto merupakan pilihan yang bijak yang dapat dilakukan oleh para investor lokal.

DIY juga dapat meningkatkan kerjasama di bidang budaya dan mengadakan kompetisi di Kyoto yang sebelumnya belum dilakukan, seperti lomba pidato bahasa Indonesia, mengadakan kursus gratis bahasa Indonesia, mengadakan seminar dengan ahli dari Yogyakarta dan segala hal yang dapat menambah eksistensi dari DIY dalam hubungan kerjasama tersebut. Tentu dalam hubungan kerjasama yang baik, eksistensi DIY dan Kyoto harus seimbang dan tidak boleh berlebihan.

Selain daripada hal tersebut, kerjasama yang ada dapat dimanfaatkan untuk saling mempelajari mengenai hal hal yang terkait dengan pandemi Covid-19. DIY dapat mempelajari cara Kyoto dapat mengendalikan infeksi Corona yang berada di wilayahnya. Kyoto dapat mengirimkan ahli kesehatannya kepada pihak DIY untuk mengadakan pelatihan dan penyuluhan mengenai epidemiologi agar dapat menambah pengetahuan para pembuat kebijakan agar dapat secara efektif menekan angka penyebaran pandemi jika terjadi lagi di masa depan.

Selain daripada hal tersebut, Kyoto dapat berperan dalam pengadaan alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam pandemi kali ini. Kyoto sendiri sudah berperan dengan aktif pada saat kejadian gempa tahun 2006 di Yogyakarta. Kyoto juga dapat mengirimkan bantuan sosial kepada daerah yang terdampak paling parah di DIY.

KESIMPULAN

Kerjasama antara DIY dan Kyoto merupakan kerjasama *Sister Province* yang sangat cukup intensif dan kolaboratif sehingga menguntungkan. Kerjasama ini memfasilitasi pertukaran sosial dan budaya yang meliputi kegiatan yang dapat memperkuat kesepahaman mutual. Kerjasama ini di bidang pendidikan diisi dengan pertukaran pelajar dan berbagai lomba yang memungkinkan terjadi *sharing culture*. Kerjasama *Sister Province* ini dilandasi dengan perjalanan sejarah kedekatan

dua kota utamanya yang diinisiasi oleh kedekatan pemimpin daerah masing-masing. Kedekatan Sultan Hamengkubuwono IX dan Yukio Hashida selaku gubernur Kyoto, yang dahulunya merupakan pasukan Jepang yang bertugas di Yogyakarta menjadi faktor penting yang sulit diabaikan. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka mewujudkan kerjasama tersebut, seperti diadakan kegiatan lomba melukis setiap tahunnya dan lukisan terpilih akan dibawa ke Kyoto untuk dipamerkan, mengadakan Jogja-Japan Week setiap dua tahun sekali dan mengadakan berbagai kunjungan kerja baik di Yogyakarta dan di Kyoto. Pada perjalanan kerjasama, di tahun 2020 kerjasama ini ditanggguhkan sementara karena kendala pandemi Covid-19 yang membuat seluruh energi pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kyoto perlu untuk dipusatkan pada penanganan pandemi. Akibatnya, sejumlah kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kerjasama dua kota.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1999)
- [2] Mukti, Takdir Ali, 2013, Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia, The Phinisi Press Yogyakarta
- [3] Pandji Santosa, 2008. Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung
- [4] Suryokusumo, Sumaryo. 2004. Praktik Diplomasi, STIH IBLAM : Jakarta
- [5] Sinaga, O. (2010). Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Implementasi Kerjasama Internasional. Jakarta. Unpad
- [6] Holsti, K.J., 'Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis', Terjemahan Tahrir Azhari, M. Tahrir Jakarta, Erlangga, Tahun 1988.
- [7] Ningsih, Sari Lestari. Pelaksanaan Sister Province Pemerintah DIY-Kyoto Jepang. 2016. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
- [8] Wicaksono, Azzomarayosra. KERJA SAMA INTERNASIONAL SISTER CITY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PERFEKTUR KYOTO. 2018. Tesis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- [9] Laporan akhir survei alih fungsi lahan DKP DIY tahun 2016
- [10] Laporan Akhir Kerjasama dalam dan Luar Negeri Pemerintahan DIY tahun 2015
- [11] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DIY Tahun 2015 pada program/kegiatan urusan kebudayaan
- [12] Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara DIY 2015
- [13] <https://thedailyjapan.com/sejarah-kyoto-dan-pembangunan-di-era-modern/>
- [14] <https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>
- [15] <http://jogjainvest.jogjaprov.go.id/diy---kyoto.html>
- [16] <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/30-karya-siap-dipamerkan-di-kyoto-2/>
- [17] <https://eng.umi.ac.id/penandatanganan-mou-antara-kyoto-university-dan-fakultas-teknik-umi/>
- [18] <http://jogjainvest.jogjaprov.go.id/mou-diy---kyoto.html>
- [19] <https://budaya.jogjaprov.go.id/agenda/detail/717-lomba-lukis-diy-kyoto>
- [20] <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/lomba-lukis-realisis-kerjasama-diy-kyoto/>
- [21] <https://jogja.tribunnews.com/2018/09/02/kerjasama-pemda-diy-kyoto-terus-berlanjut>
- [22] <https://internasional.kontan.co.id/news/kasus-corona-turun-jepang-cabut-keadaan-darurat-di-osaka-kyoto-hyogo>
- [23] <https://regional.kompas.com/read/2020/10/06/22313431/pemprov-diy-terapkan-micro-lockdown-untuk-putus-penyebaran-virus-corona>
- [24] <https://republika.co.id/berita/o0n71m313/bangun-industri-pariwisata-budaya-yogyakarta-harus-belajar-dari-kyoto>

[28] Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). Penerapan E Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI(2), 4.

[29] Duchacek, I. D., Publius, S., States, F., & Autumn, I. R. (2018). The International Dimension

of Subnational Self-Government Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/3330188> Linked references are available on JSTOR for this article : The International Dimension of Subnational Self-Government, 14(4), 5–31.